

20	Susu Balita (SGM) 400Gr	Rp 40,500	Rp 40,500	Rp 40,500	Rp 40,500	Rp 40,500	Rp 40,500	0.00%
21	Jeruk 1 Kg	Rp 28,000	Rp 26,000	Rp 26,000	Rp 26,000	Rp 20,000	Rp 20,000	0.00%

Berdasarkan data survey harga kebutuhan pokok pada Sistem Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SiLinda Jabar) di Pasar Banjar, pada Bulan April - Juni 2025 dapat disampaikan secara umum terjadi fluktuasi harga pada sejumlah komoditas pangan pokok dan penting di Indonesia. Beberapa komoditas, terutama yang sensitif terhadap kondisi cuaca dan pasokan (seperti cabe merah, cabe rawit merah, bawang merah dan putih), menunjukkan fluktuasi harga yang signifikan, yang dapat berisiko untuk kestabilan harga di kedepannya.

a. Komoditas dengan kenaikan signifikan

Pada periode April hingga Juni, salah satu komoditas yang menunjukkan kenaikan harga adalah beras medium. Pada bulan April, harga beras medium tercatat Rp. 11,700,- kemudian naik menjadi Rp. 12,500,- pada bulan Juni, yang menunjukkan kenaikan sebesar 6.84% pada bulan Mei dan 5.83% pada bulan Juni. Kenaikan harga ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti permintaan yang meningkat atau adanya penurunan pasokan. Selain itu, daging ayam broiler juga mengalami kenaikan harga dari Rp. 28,000,- di bulan Mei menjadi Rp. 30,000,- (7,13%) di bulan Juni.

b. Komoditas dengan Harga stabil

Beberapa komoditas menunjukkan kestabilan harga selama triwulan II ini. Antara lain :

- Beras premium: stabil di harga Rp16.000 per kilogram.
- Minyak goreng kita : tetap di harga Rp17.000 per liter.
- Susu bubuk, tempe, tahu, pisang, udang, dan susu balita (SGM) juga menunjukkan tidak ada perubahan harga yang signifikan.

Stabilitas harga ini menandakan bahwa faktor musiman tidak memberikan dampak signifikan pada komoditas-komoditas tersebut, dan pasokan dapat dipenuhi secara konsisten. Dalam hal ini, stabilitas harga menjadi indikasi bahwa komoditas-komoditas tersebut memiliki daya tahan yang baik terhadap guncangan pasar.

c. Komoditas dengan penurunan harga

Penurunan harga tercatat pada:

- Cabe Merah turun dari Rp. 40.000,- (M2 April) menjadi Rp. 28.000,- (M4 Juni) atau sekitar -30%
- Cabe Rawit Merah turun dari Rp. 105.000,- (M2 April) menjadi Rp. 75.000,- (M4 Juni) atau sekitar -28.57%
- Bawang Merah turun dari Rp. 56.000,- (M2 April) menjadi Rp. 45.000,- (M4 Juni)

atau sekitar -19.64%

- Bawang Putih turun dari Rp. 48.000,- (M2 April) menjadi Rp. 38.000,- (M4 Juni) atau sekitar -20.83%
- Jeruk turun dari Rp. 28.000,- (M2 April) menjadi Rp. 20.000,- (M4 Juni) atau sekitar -28.57%
- Daging Sapi turun dari Rp. 130.000,- (M2 April) menjadi Rp. 125.000,- (M4 Juni) atau sekitar -3.85%

Penurunan ini mencerminkan volatilitas harga yang tinggi, yang mungkin disebabkan oleh faktor musiman seperti hasil panen yang melimpah atau pengaruh kebijakan impor yang mempengaruhi pasokan domestik.

d. Tren Bulanan

Pada bulan April, harga beberapa komoditas seperti Cabe Merah dan Bawang Merah menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pasokan yang melimpah akibat panen musiman, yang menekan harga turun. Namun, pada bulan Mei, terjadi sedikit pemulihan harga, meskipun beberapa komoditas seperti Cabe Rawit Merah masih menunjukkan penurunan yang signifikan.

Memasuki bulan Juni, pasar mengalami fluktuasi harga yang cukup besar. Kenaikan harga pada Beras Medium dan Daging Ayam Broiler menunjukkan adanya perubahan tren, dengan permintaan yang meningkat seiring dengan stabilitas pasokan yang terjaga. Namun, komoditas seperti Cabe Merah dan Cabai Rawit Merah justru mengalami penurunan tajam yang menunjukkan ketidakseimbangan yang terjadi di Pasar Banjar.

e. Komoditas Pangan dengan Risiko Tinggi ke depan

Komoditas-komoditas dengan volatilitas harga yang tinggi, seperti Cabe Merah dan Cabai Rawit Merah, menunjukkan potensi risiko yang cukup besar dalam kestabilan harga kedepannya. Fluktuasi yang tajam ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian pasar dan memberi dampak negatif pada daya beli masyarakat, terutama di kalangan konsumen dengan pendapatan rendah.

Selain itu, Bawang Merah juga menunjukkan pola harga yang tidak stabil, yang mengindikasikan adanya potensi risiko tinggi terhadap pasokan di masa depan. Oleh karena itu, komoditas-komoditas ini memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi produksi maupun distribusi, untuk menghindari lonjakan harga yang berlebihan.

f. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis harga bahan pokok di Pasar Banjar pada triwulan II 2025, dapat disimpulkan bahwa beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga yang cukup besar, terutama Cabe Merah, Cabai Rawit Merah, dan Bawang Merah. Harga komoditas-komoditas ini tidak stabil dan berisiko mempengaruhi kestabilan pasar pangan di masa depan.

Sebaliknya, beberapa komoditas lain seperti Beras Premium, Gula Pasir Lokal, dan Susu Bubuk tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas-komoditas tersebut lebih tahan terhadap perubahan harga dan cenderung lebih dapat diandalkan di pasar.

Untuk mengatasi fluktuasi harga yang besar, disarankan agar dilakukan pemantauan lebih intensif terhadap komoditas yang mengalami perubahan harga tajam, terutama yang bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, penting untuk lebih fokus pada pengelolaan pasokan dan distribusi agar harga tetap stabil dan tidak merugikan konsumen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Faktor Cuaca dan Musim sangat mempengaruhi produksi hasil pertanian di Kota Banjar dan sekitarnya. Cuaca buruk atau musim kemarau yang panjang dapat mengurangi hasil panen, terutama untuk komoditas seperti Cabe Merah, Bawang Merah, dan Cabai Rawit Merah, yang sering mengalami fluktuasi harga tajam akibat pasokan yang terbatas. Ketidakpastian cuaca ini membuat kestabilan harga bahan pokok menjadi sangat rentan terhadap perubahan musim. Kenaikan harga bahan pokok yang tajam sebagai akibat dari kekurangan pasokan, yang akhirnya mendorong inflasi harga pangan di Pasar Banjar. Hal ini berisiko meningkatkan biaya hidup masyarakat, terutama kalangan berpendapatan rendah.
2. Rantai Pasok yang Tidak Efisien: Perbedaan harga yang cukup besar antara harga di tingkat produsen (petani) dan harga di tingkat konsumen mengindikasikan adanya masalah dalam rantai pasok. Beberapa berita pada periode ini menyoroti masalah infrastruktur yang kurang memadai, biaya transportasi yang tinggi, dan praktik penimbunan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
3. Daya Beli Masyarakat -> Penurunan daya beli masyarakat di Kota Banjar menjadi faktor penting yang memperburuk dampak inflasi. Ketika harga barang-barang pokok mengalami kenaikan, namun pendapatan masyarakat tidak meningkat sebanding, maka daya beli akan menurun. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Terjadi ketidakmampuan masyarakat untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok, yang semakin memicu masalah kemiskinan.
4. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kota Banjar -> Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemda Kota Banjar menjadi kendala dalam menjalankan program-program pengendalian inflasi yang efektif. Tanpa dana yang memadai, upaya-upaya penguatan sistem distribusi, penyuluhan kepada petani, atau subsidi pangan untuk masyarakat yang membutuhkan sulit dilakukan. Program pengendalian inflasi menjadi terbatas, kurang efektif, dan tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan ketidakstabilan harga dan membuat kesulitan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Ketergantungan pada Daerah Pemasok -> Ketergantungan bahan pokok dari luar daerah dapat berpengaruh terhadap pemenuhan pasokan di Kota Banjar. Jika terjadi kenaikan harga bahan pokok di Daerah Penghasil maka di Kota Banjar juga

akan terpengaruh.

6. Ekspektasi Inflasi: Kenaikan harga beberapa komoditas dapat memicu ekspektasi inflasi di kalangan masyarakat. Beberapa berita lokal melaporkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi inflasi akibat kenaikan harga pangan.
7. Pengendalian inflasi di Kota Banjar menghadapi berbagai tantangan yang saling terkait, mulai dari faktor cuaca dan musim, ketidakstabilan rantai pasok, daya beli masyarakat yang menurun, hingga keterbatasan koordinasi antar instansi pemerintah dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi, serta upaya untuk memperkuat infrastruktur dan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan kesejahteraan masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga

- a. Selasa Pasar Hasil Tani (Sapa Hati) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada triwulan II dilaksanakan sebanyak 1 kali (19 Juni 2025), konsep membuka pasar bagi para petani yaitu dalam rangka mempertemukan petani dengan konsumen. Ada berbagai komoditas yang ditawarkan oleh petani dalam kegiatan ini, mulai dari Cabe, bawang, beras dan aneka macam komoditas penyumbang inflasi. Yang tentunya komoditas yang dijual diacara ini memiliki harga yang lebih murah ketimbang harga pasar. Leading Sektor Jumpa Hati ini yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- b. Operasi Pasar Murah (OPM) pada triwulan II dilaksanakan sebanyak 1 kali pada tanggal 03 Juni 2025. Operasi Pasar Murah (OPM) merupakan salah satu strategi intervensi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Di Kota Banjar sendiri pelaksanaan OPM memiliki peran penting, khususnya dalam menghadapi periode rawan inflasi
- c. Operasi Pasar Murah Bersubsidi (Opadi) triwulan II dilaksanakan sebanyak 1 kali pada tanggal 04 Juni 2025 yang dilaksanakan di Kecamatan Banjar. Operasi Pasar Murah Bersubsidi sebagai upaya konkret dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat, khususnya menjelang periode rawan inflasi. Pelaksanaan program ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial, perlindungan daya beli masyarakat, dan pengendalian inflasi daerah.
- d. Pemantauan harga di pasar tradisional dilaksanakan setiap hari senin s.d jum'at dengan pasar pantauan yaitu Pasar Banjar.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan daerah dan mendorong kemandirian sektor pertanian, Pemerintah Kota melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan Gerakan Menanam yang dilaksanakan pada tanggal 23 April, 14 Mei dan 04 Juni 2025.
- b. Pelaksanaan Panen Raya Padi Serentak dengan rata-rata panen sebesar 7

ton/hektar, dimana lebih banyak dari rata-rata panen GKG Provinsi Jawa Barat (07 April 2025).

- c. Kegiatan Pakarangan Sagala Aya (PAKAYA-P2L) yang menjadi program unggulan dari Kota Banjar à Program kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui penanaman cabai rawit dan komoditas pangan penyumbang inflasi di lahan pekarangan KWT maupun masyarakat umum. Dengan tujuan antara lain ; Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, Pemenuhan kebutuhan pasokan cabai rawit di Kota Banjar sehingga sedikit demi sedikit mengurangi pasokan dari luar Kota Banjar.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Pemantauan ketersediaan bahan pangan pokok tingkat distributor merupakan bagian penting dari upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga di daerah. Selama Triwulan II tahun 2025, Dinas KUKMP dan Dinas KP3 Kota Banjar bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjar telah melakukan observasi dan pengumpulan data lapangan terhadap stok dan distribusi pangan pada tingkat distributor dan pedagang pasar di Kota Banjar.

4. Komunikasi Efektif

- a. High Level Meeting Pemerintah Kota Banjar dalam rangka merumuskan kebijakan pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung oleh Pj. Wali Kota Banjar dan Wali Kota Banjar perihal pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan sebanyak 3 kali pada triwulan II 2025 (22 April 2025, 19 Mei dan 12 Juni 2025). Wali Kota Banjar dan Wali Kota Banjar menginstruksikan agar memperhatikan penyebab terjadinya inflasi di Kota Banjar. Jangan sampai penyebab inflasi di Kota Banjar membuat daya beli masyarakat yang menurun.
- b. Pelaksanaan Sidak Pasar di Kota Banjar selama triwulan II dilaksanakan sebanyak 6 kali (14 & 30 April, 05 & 30 Mei, 09 & 30 Juni 2025) dengan tujuan untuk memantau ketersediaan stok komoditas pangan pokok, sidak pasar pun dilakukannya untuk memastikan keamanan pangan yang dijual di pasar. Adapun leading sector sidak pasar sendiri yaitu dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Dinas KP3
- c. Mengikuti Rapat Koordinasi Dwi Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
- d. Pelaporan harga pangan secara harian melalui Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah (Silinda) Jabar, Sistem Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Simawas Pagi) dan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)
- e. Publikasi data harga bahan kebutuhan pokok di media sosial dan Papan running text yang ada di depan alun-alun Kota Banjar.
- f. Pengawasan peredaran barang dan jasa di Kota Banjar.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga (K1)

- a. Upaya intervensi pasar (SapaHati dan GPM) memiliki potensi untuk meningkatkan keterjangkauan harga, tetapi efektivitasnya terbatas karena hanya dilaksanakan sebulan sekali bahkan pada triwulan II ini hanya dilaksanakan 1 kali.
- b. Evaluasi efektivitas Sapa Hati, OPM dan GPM secara lebih mendalam, termasuk cakupan, dampak terhadap harga pasar, dan keberlanjutan. Pertimbangkan untuk meningkatkan frekuensi atau cakupan program intervensi pasar, terutama untuk komoditas yang sering mengalami fluktuasi harga.

2. Ketersediaan Pasokan (K2)

- a. Program PAKAYA-P2L merupakan langkah positif untuk meningkatkan kemandirian pangan lokal, tetapi dampaknya belum terasa signifikan dalam jangka pendek.
- b. Fokus pada perluasan dan penguatan program PAKAYA-P2L, termasuk pendampingan, pelatihan, dan penyediaan bibit yang berkualitas. Lakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kontribusi PAKAYA-P2L terhadap pasokan pangan lokal.

3. Kelancaran Distribusi (K3)

- a. Perlu melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Pemerintah Kota Banjar dengan Daerah penghasil agar dapat menutupi stok bahan pangan yang cenderung stoknya sedikit di triwulan II Kota Banjar

4. Komunikasi Efektif (K4)

- a. Pemerintah Kota Banjar telah melakukan upaya yang baik dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak dan melakukan pengawasan pasar.
- b. Tingkatkan kualitas dan diseminasi informasi harga, termasuk analisis penyebab fluktuasi harga dan rekomendasi bagi konsumen dan pelaku pasar. Perkuat koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian inflasi.
- c. Lebih peka dengan data yang ada dilapangan, dimana selama triwulan II Kota Banjar mengalami inflasi, sehingga membutuhkan peran pemerintah dalam rangka mengatasi inflasi ini, karena bisa membuat konsumen atau masyarakat merugi dengan harga yang semakin naik.
- d. Penyediaan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat perlu ditingkatkan dan dilakukan secara terkoordinasi sehingga menghasilkan satu data harga di tingkat konsumen (pasar tradisional) atau bahkan harga ditingkat Distributor.
- e. Rapat koordinasi ditingkat teknis perlu dilakukan lebih rutin dengan melibatkan dinas terkait dan stakeholder terkait lainnya

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemerintah Kota Banjar perlu bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam mengadakan Sapahati, OPM dan GPM sehingga dapat meningkatkan frekuensi

pelaksanaannya.

2. Pemerintah Kota Banjar perlu memperluas dan memperkuat program PAKAYA-P2L, dengan memberikan pendampingan intensif, pelatihan yang relevan, dan penyediaan bibit berkualitas kepada masyarakat.
3. Mengimplementasikan program subsidi pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan daya beli mereka dalam menghadapi inflasi.
4. Identifikasi dan atasi hambatan dalam rantai pasok dan distribusi pangan, seperti infrastruktur yang kurang memadai, biaya transportasi yang tinggi, atau praktik spekulasi yang merugikan.
5. Penting untuk bekerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan untuk memastikan pasokan tetap stabil, terutama untuk komoditas yang stoknya cenderung sedikit di Kota Banjar.
6. Pemerintah Kota Banjar perlu meningkatkan kualitas dan diseminasi informasi harga, termasuk analisis penyebab fluktuasi harga dan rekomendasi bagi konsumen serta pelaku pasar.
7. Perkuat koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian inflasi, termasuk Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas KP3, Bank Indonesia, dan BPS.
8. Lebih peka terhadap data yang ada di lapangan, terutama terkait inflasi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian yang dialami masyarakat akibat kenaikan harga.
9. Penyediaan informasi harga yang mudah diakses oleh masyarakat perlu ditingkatkan dan dilakukan secara terkoordinasi, sehingga tercipta satu data harga yang akurat dan terpercaya.
10. Rapat koordinasi di tingkat teknis perlu dilakukan lebih rutin dengan melibatkan dinas terkait dan stakeholder lainnya, untuk membahas isu-isu terkini dan merumuskan solusi yang efektif.
11. Hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Dinas teknis terkait supaya dapat disinkronkan dengan hasil pemantauan Dinas KUKMP dan selanjutnya dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
12. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersifat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder (pemangku kepentingan), sebagai pemberi bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah Kota Banjar dalam menyikapi perkembangan fluktuasi harga terkini dan langkah-langkah strategis yang diperlukan.
13. Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah untuk mendanai program pengendalian inflasi dan pengembangan infrastruktur yang mendukung stabilitas harga.